POLITICAL WILL PEMERINTAH KOTA MATARAM DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI KOTA MATARAM

Muhammad Riza Mulya Akbar
NPP. 33.0653
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: riza90367@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Riyan Jaelani, S.STP, M.Tr.I.P
Email: riyan@ipdn.ac.id

ABSTRACT

***Problem Statement**: Poverty remains a multidimensional problem in Mataram City despite various poverty alleviation programs implemented by the local government. Previous studies on political will generally focused only on policy outputs and formal regulations, while limited studies examined the role of political actors, commitment, and consistency of local governments in poverty alleviation policies**. Purpose**: This study aims to analyze the Political will of the Mataram City Government in alleviating poverty in Mataram City. **Method**: This study used a descriptive qualitative approach. Data collection techniques were conducted through interviews, observation, and documentation. The analysis employed Brinkerhoff's Political will theory consisting of initiative, policy choice, mobilization of support, public commitment and resource allocation, credible sanctions, continuity of effort, and learning and adaptation. **Result**: The findings indicate that the Political will of the Mataram City Government in poverty alleviation has generally been implemented quite well through various social assistance programs, community empowerment, cross-sector coordination, and budget allocation. The government has also shown commitment through integrated poverty reduction policies and periodic evaluations. However, several obstacles remain, including limited budget allocation, inaccurate beneficiary data, low community participation, and the complexity of urban poverty problems**. Conclusion**: This study concludes that the Political will of the Mataram City Government in poverty alleviation has been implemented relatively well, although several challenges still hinder the effectiveness of poverty alleviation programs. Strengthening data integration, policy consistency, and community empowerment are necessary to improve the sustainability and effectiveness of poverty reduction programs.*

***Keywords**: Local Government; Political will; Poverty.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/*Research Gap*): Kemiskinan masih menjadi persoalan multidimensional di Kota Mataram meskipun pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai *political will* masih berfokus pada output kebijakan dan regulasi formal, sementara penelitian yang mengkaji komitmen aktor politik serta konsistensi pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan masih terbatas. **Tujuan**: Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis *Political will* Pemerintah Kota Mataram dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Mataram. **Metode**: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis penelitian menggunakan teori *Political will* dari Brinkerhoff yang terdiri dari dimensi inisiatif, pilihan kebijakan, mobilisasi dukungan, komitmen publik dan alokasi sumber daya, penerapan sanksi yang kredibel, keberlanjutan usaha, serta pembelajaran dan adaptasi. **Hasil/Temuan**: Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Political will* Pemerintah Kota Mataram dalam penanggulangan kemiskinan secara umum telah berjalan cukup baik melalui berbagai program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, koordinasi lintas sektor, serta pengalokasian anggaran. Pemerintah daerah juga menunjukkan komitmen melalui pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dan evaluasi program secara berkala. Namun demikian, masih terdapat hambatan berupa keterbatasan anggaran, ketidaktepatan data penerima bantuan, rendahnya partisipasi masyarakat, dan kompleksitas persoalan kemiskinan perkotaan. **Kesimpulan**: Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Political will* Pemerintah Kota Mataram dalam menanggulangi kemiskinan telah berjalan relatif baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Penguatan integrasi data, konsistensi kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan.

Kata kunci: Kemiskinan; Pemerintah Daerah; *Political will.*

I. PENDAHULUAN

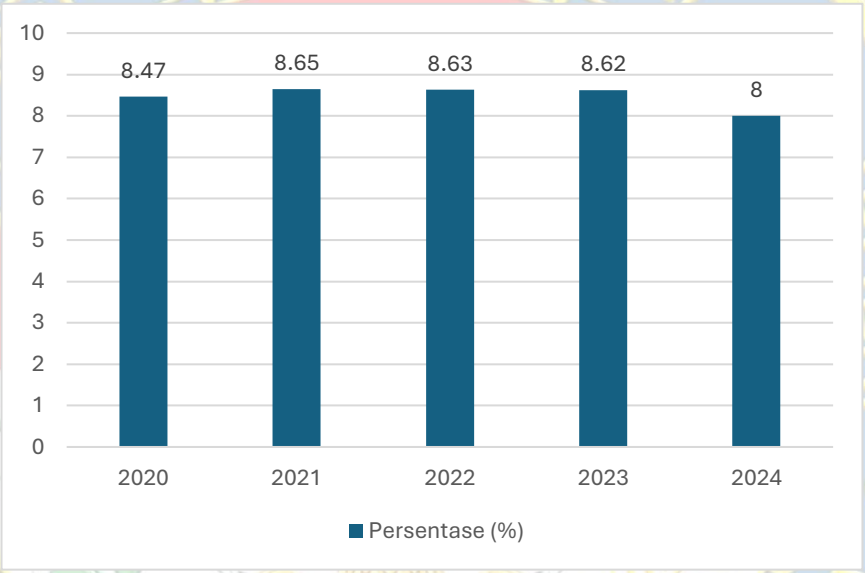
1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga menyangkut keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kualitas hidup yang layak (Budiantoro et al., 2013). Meskipun sudah ada kemajuan global, sekitar 1,1 miliar orang di dunia masih terjebak dalam kemiskinan multidimensi yang membuat mereka mengalami berbagai keterbatasan (Ansar et al., 2026). Faktor pemicu kemiskinan sangat kompleks, meliputi urbanisasi, ledakan penduduk, ketimpangan pendidikan, dan keterbatasan infrastruktur. Masalah ini kian diperparah oleh minimnya lapangan kerja, tingginya angka pengangguran, ketidakadilan sosial, serta kelangkaan sumber daya alam. Selain itu, lemahnya dukungan kebijakan pemerintah dan lonjakan harga kebutuhan pokok membuat beban hidup masyarakat semakin berat (Rahmah et al., 2022). Menurut Sen (1999) kemiskinan merupakan *deprivation of capabilities* atau keterbatasan kemampuan manusia dalam mencapai kehidupan yang bernilai. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan ekonomi, melainkan juga persoalan sosial dan politik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, selama sepuluh tahun terakhir angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan yang kurang signifikan. Menurut Jeddawi et al., (2025) tingkat kemiskinan suatu wilayah dipengaruhi secara langsung dan tidak langsung oleh implementasi desentralisasi fiskal, khususnya pada aspek pengelolaan pengeluaran daerah. Sutiyo dan Maharjan (2011) menjelaskan bahwa program penanggulangan kemiskinan di Indonesia sering mengalami *implementation gap*, yaitu kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasi di lapangan. Program yang telah dirancang dengan baik sering kali tidak mampu mencapai hasil yang diharapkan akibat lemahnya implementasi, kapasitas birokrasi, dominasi elit

lokal, serta ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Sementara menurut Zulaikha et al., (2024) bahwa daerah dengan sistem otonomi khusus lebih fleksibel dalam membuat kebijakan dan program terkait pengentasan kemiskinan.

Provinsi Nusa Tenggara Barat masih termasuk salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025, persentase penduduk miskin di NTB mencapai 11,78 persen (Badan Pusat Statistik, 2025). Sementara itu, Kota Mataram sebagai ibu kota Provinsi NTB mengalami penurunan tingkat kemiskinan yang relatif lambat dibandingkan beberapa daerah lain di NTB.

Gambar 1.
Persentase Penduduk Miskin Kota Mataram 2020-2024



Sumber : Diolah dari Data BPS Kota Mataram, 2025

Berdasarkan **Gambar 1** Perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Mataram dari tahun 2020 hingga 2024 cukup mengalami fluktuatif. Pada maret 2020, persentase penduduk miskin di Mataram tercatat sebesar 8,47%. Pada tahun-tahun berikutnya, penurunannya relatif stabil namun berada di kisaran yang sedikit berubah, penurunan yang cukup signifikan terjadi pada maret 2024 yakni menjadi 8,0% turun sekitar 0,62 persen di banding tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan di Kota Mataram masih menjadi tantangan penting bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu penelitian ini ingin mengkaji permasalah tersebut melalui sudut pandang *political will* pemerintah.

Political will didefinisikan sebagai tingkat komitmen para pembuat keputusan utama untuk memberlakukan dan menerapkan suatu kebijakan, yang dicirikan oleh tiga komponen utama berupa otoritas untuk menegakkan aturan, kapasitas sumber daya untuk implementasi efektif, dan legitimasi atau pengakuan kebenaran tindakan oleh para pemangku kepentingan (Shen, 2025). Menurut Askali (2025) *political will* dalam pemerintahan secara signifikan membentuk kepercayaan publik, keterlibatan warga, dan hasil kebijakan. Kajian mengenai *political will* menjadi penting karena keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh

keberadaan program, tetapi juga ditentukan oleh komitmen, konsistensi, dan keberpihakan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Hal ini sejalan dengan pernyataan Nemakonde (2026) yang mengatakan bahwa *political will* adalah katalisator yang menentukan untuk integrasi, ketidakhadirannya melanggengkan tata kelola yang terkotak-kotak, sementara kehadirannya mendorong penataan ulang kelembagaan, koherensi keuangan, dan hasil ketahanan yang terkoordinasi *Political will* mencerminkan sejauh mana aktor politik memiliki komitmen nyata dalam menyelesaikan persoalan publik.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai *political will* lebih banyak menyoroti kebijakan formal dan output program pemerintah tanpa membahas secara mendalam dimensi aktor politik yang berperan dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, penelitian mengenai *political will* pemerintah daerah dalam konteks penanggulangan kemiskinan di Kota Mataram masih sangat terbatas. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan penanggulangan kemiskinan belum tentu mencerminkan adanya komitmen politik yang kuat dalam implementasi di lapangan. Hal tersebut terlihat dari masih rendahnya efektivitas sejumlah program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat di berbagai daerah. Meskipun berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Mataram, tingkat penurunan kemiskinan yang relatif rendah menunjukkan adanya persoalan yang perlu dikaji lebih mendalam, khususnya terkait komitmen dan *political will* pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting mengingat untuk memberikan gambaran empiris mengenai *Political will* Pemerintah Kota Mataram dalam menanggulangi kemiskinan sebagai dasar perumusan strategi oleh pemerintah daerah selanjutnya dalam meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan di tengah berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran, ketidaktepatan data penerima bantuan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kompleksitas persoalan kemiskinan perkotaan. Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, maka pemerintah dan pemangku kebijakan akan kekurangan dasar empiris yang kuat dalam memahami sejauh mana komitmen politik pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan sehingga perumusan kebijakan berisiko kurang efektif dan tidak tepat sasaran.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu terkait *political will* pemerintah daerah. Azizah et al. (2020) meneliti *political will* Pemerintah Kabupaten Jombang terhadap penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan kualitatif yang menunjukkan bahwa komitmen pemerintah daerah dipengaruhi oleh konsistensi implementasi program sosial, namun terlalu berfokus pada konsistensi program makro tanpa membedah bagaimana ego sektoral antar-dinas menghambat integrasi data kemiskinan. Albaar & Athahirah (2025) meneliti *Political Will* Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menemukan bahwa bahwa political will yang kuat menjadi salah satu alasan Kota Ternate menjadi daerah paling tahan pangan di Provinsi Maluku Utara. Nurmala et al. (2024) meneliti *political will* Pemerintah Kabupaten Karawang dalam pengembangan UMKM dan menemukan bahwa dukungan kebijakan daerah

sangat mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan ekonomi Masyarakat, tetapi cenderung bersifat umum dan satu dimensi; mereka berhasil membuktikan bahwa *political will* berdampak positif pada ketahanan pangan dan UMKM, tetapi melewatkan analisis mengenai bagaimana skema bantuan sosial (karikatif) dan pemberdayaan ekonomi disinkronkan secara konvergen dalam intervensi kemiskinan.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Mendrofa dan Sonuari (2025) mengenai *political will* Pemerintah Kota Bekasi dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang menunjukkan bahwa *political will* dipengaruhi oleh kepemimpinan dan kapasitas birokrasi, namun belum mampu memberikan resolusi atas masalah kegagalan implementasi akibat anggaran yang tidak memadai di lapangan. Selain itu, penelitian oleh Haliah et al. (2025) menunjukkan bahwa *political will* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dalam pelaporan keuangan tetapi memiliki kelemahan dalam konteks kebijakan sosial karena fokusnya yang murni berada pada aspek akuntabilitas keuangan dan pencegahan fraud, sehingga polanya tidak dapat digeneralisasi untuk mengukur sensitivitas politik dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat bawah. Secara umum, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *political will* menjadi faktor penting dalam keberhasilan kebijakan publik. Di sinilah posisi penelitian saat ini hadir untuk mengisi kekosongan penelitian (*research gap*) tersebut.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya Ketika penelitian terdahulu masih melihat *political will* secara parsial hanya berfokus pada salah satu aspek seperti regulasi, kepemimpinan, atau satu sektor program saja, penelitian di Kota Mataram ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan menguji *political will* melalui tiga pilar konvergen sekaligus, yaitu integrasi bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan efektivitas koordinasi lintas sektor dalam satu kesatuan analisis. Kota Mataram dipilih karena memiliki karakteristik unik sebagai pusat urban yang berhasil mereduksi hambatan birokrasi dan ego sectoral. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori *Political will* dari Brinkerhoff dengan tujuh dimensi yaitu inisiatif, pilihan kebijakan, mobilisasi dukungan, komitmen publik dan alokasi sumber daya, penerapan sanksi yang kredibel, keberlanjutan usaha, serta pembelajaran dan adaptasi. Kebaruan penelitian juga terlihat dari fokus penelitian yang tidak hanya melihat keberadaan kebijakan formal, tetapi juga menganalisis komitmen dan konsistensi aktor politik dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Kontribusi ilmiah baru dari penelitian di Kota Mataram ini terletak pada rekonstruksi teoretis dan metodologis terhadap konsep *political will* (kemauan politik), yang mendobrak keterbatasan studi terdahulu yang cenderung bias dan menilai aspek tersebut secara parsial (hanya berfokus secara terpisah pada regulasi, kepemimpinan, atau satu sektor program saja). Kebaruan ilmiah (*scientific novelty*) yang dihasilkan adalah sebuah model analisis holistik dan konvergen yang menguji komitmen politik secara simultan melalui integrasi bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan efektivitas koordinasi lintas sektor dalam satu kesatuan sistem. Secara teoretis, penelitian ini membuktikan bahwa *political will* tidak dapat dinilai dari satu dimensi kebijakan saja, melainkan harus diukur dari keterpaduan eksekusi perlindungan, keberlanjutan dampak pada publik, dan hilangnya ego sektoral birokrasi, sehingga menyediakan kerangka kerja baru yang lebih akurat bagi literatur kebijakan publik dan studi empiris tata kelola pemerintahan daerah.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *Political will* Pemerintah Kota Mataram dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Mataram.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam bagaimana *Political will* Pemerintah Kota Mataram dalam menanggulangi kemiskinan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan di Kota Mataram seperti Bappeda Kota Mataram, Dinas Sosial Kota Mataram, serta masyarakat penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan sebanyak 10 informan. Informan kunci dari penelitian ini adalah Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan, Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Mataram. Informan ini dipilih secara *purposive* karena memegang otoritas struktural dan penguasaan data teknis sebagai pelaksana utama kebijakan penanganan kemiskinan di Kota Mataram Observasi dilakukan untuk melihat kondisi lapangan dan implementasi program penanggulangan kemiskinan. Dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan data statistik, dokumen kebijakan, laporan pemerintah, dan dokumen pendukung lainnya.

Teknik pengujian keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan bantuan aplikasi Nvivo 12 untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi sebenarnya. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori *Political will* dari Brinkerhoff (2010) yang terdiri dari tujuh dimensi yaitu inisiatif, pilihan kebijakan, mobilisasi dukungan, komitmen publik dan alokasi sumber daya, penerapan sanksi yang kredibel, keberlanjutan usaha, serta pembelajaran dan adaptasi. Penelitian dilaksanakan di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat selama kurang lebih dua bulan melalui proses observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumentasi penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis *Political will* Pemerintah Kota Mataram dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kota Mataram menggunakan pendapat dari Brinkerhoff yang menyatakan bahwa *political will* dapat diuraikan ke dalam tujuh dimensi, yaitu inisiatif, pilihan kebijakan, mobilisasi dukungan, komitmen publik & alokasi sumber daya, penerapan sanksi kredibel, keberlanjutan usaha, serta pembelajaran dan adaptasi (Brinkerhoff, 2010). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Inisiatif Pemerintah

Kota Mataram menunjukkan adanya inisiatif dalam penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dan kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Inisiatif tersebut terlihat dari upaya pemerintah daerah dalam melakukan pembaruan data terpadu kesejahteraan sosial, pelaksanaan bantuan sosial, serta pengembangan program pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi lokal. Pemerintah daerah juga berupaya menyesuaikan program penanggulangan kemiskinan dengan kondisi sosial masyarakat perkotaan

yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan daerah pedesaan. Wawancara dengan salah satu informan yang mengatakan:

> Kalau di dinas sosial, dalam pengentasan kemiskinan kemarin kita mengadakan pelatihan, pelatihan-pelatihan keterampilan dan sudah banyak sekali kita menghasilkan pelatihan dari tahun 2023 itu, pelatihan itu, ada menjahit, ada kecantikan, ada pengolahan makanan seperti itu, ada untuk servis AC ringan seperti itu, ada perbengkelan, jadi memang tujuan kami, supaya masyarakat di sini bisa mendapatkan penghasilan di hal lain, dengan usaha yang baru ini siapa tau bahwa usaha yang baru ini yang bisa menjadikannya mereka lebih produktif sehingga income mereka bertambah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, pemerintah daerah secara aktif memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat melalui kegiatan pendataan dan monitoring lapangan. Temuan ini menunjukkan bahwa inisiatif pemerintah daerah tidak hanya berhenti pada penyusunan kebijakan, tetapi juga diwujudkan melalui tindakan nyata dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

3.2. Pilihan Kebijakan

Pilihan kebijakan Pemerintah Kota Mataram dalam penanggulangan kemiskinan diwujudkan melalui berbagai program bantuan sosial, pelayanan kesehatan, bantuan pendidikan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan UMKM. Pemerintah daerah berupaya mengintegrasikan berbagai program tersebut agar mampu menjangkau masyarakat miskin secara lebih luas dan berkelanjutan. Kebijakan yang diambil juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada bantuan langsung, tetapi juga pada peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.

Dalam implementasinya, Pemerintah Kota Mataram menyesuaikan program dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Program bantuan sosial diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, sementara program pemberdayaan ekonomi bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil observasi, pilihan kebijakan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam menciptakan keseimbangan antara bantuan jangka pendek dan pembangunan kesejahteraan jangka panjang.

3.3. Mobilisasi Dukungan

Pemerintah Kota Mataram melakukan mobilisasi dukungan dengan melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Dukungan tersebut berasal dari organisasi perangkat daerah, masyarakat, lembaga sosial, serta pihak swasta yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaan program sosial dan pemberdayaan masyarakat. Koordinasi lintas sektor dilakukan untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mobilisasi dukungan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan program penanggulangan kemiskinan. Pemerintah daerah berupaya membangun komunikasi dan koordinasi antar lembaga agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti perbedaan prioritas antar lembaga serta keterbatasan sumber daya yang mempengaruhi optimalisasi koordinasi lintas sektor.

3.4. Komitmen Publik dan Alokasi Sumber Daya

Komitmen Pemerintah Kota Mataram dalam penanggulangan kemiskinan terlihat melalui pengalokasian anggaran untuk program-program kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah menyediakan anggaran untuk bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah juga menunjukkan komitmen publik melalui penyampaian program prioritas yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat miskin.

Tabel 1
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram kategori Belanja Bantuan Sosial

No	Tahun	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan (%)
1	2018	15.774.617.500,00	-
2	2019	20.008.020.000,00	26,84
3	2022	13.223.484.329,00	-33,91
4	2023	13.033.790.000,00	-1,43
5	2024	11.676.200.000,00	-10,42
		Rata-rata Pertumbuhan	-4,73%

Sumber: RPKD 2021-2026, 2025

Tabel 1 menunjukkan data Realisasi APBD Kota Mataram untuk kategori Belanja Bantuan Sosial periode tahun 2018 hingga 2024 yang bersumber dari RPKD 2021-2026. Alokasi anggaran tertinggi tercatat pada tahun 2019 sebesar Rp20.008.020.000,00 dengan lonjakan pertumbuhan positif mencapai 26,84%. Sebaliknya, pasca-tahun tersebut, nilai realisasi terus mengalami tren penurunan berturut-turut dari tahun 2022 hingga mencapai titik terendah pada tahun 2024 sebesar Rp11.676.200.000,00. Akibat penurunan yang konsisten di tiga tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan tahunan untuk anggaran belanja bantuan sosial ini bernilai negatif, yaitu sebesar -4,73%, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran masih menjadi hambatan dalam optimalisasi program penanggulangan kemiskinan. Besarnya kebutuhan masyarakat miskin belum sepenuhnya mampu dipenuhi oleh kapasitas anggaran daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah berupaya melakukan prioritas program dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran agar pelaksanaan program tetap berjalan secara maksimal.

3.5. Penerapan Sanksi yang Kredibel

Pemerintah Kota Mataram melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan guna memastikan program berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Pengawasan dilakukan melalui monitoring pelaksanaan program, evaluasi penggunaan anggaran, serta pemeriksaan terhadap ketepatan data penerima bantuan sosial. Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalisir penyimpangan dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan pengawasan dan sanksi administratif telah dilakukan meskipun belum sepenuhnya optimal. Pemerintah daerah berupaya memberikan teguran maupun evaluasi terhadap pelaksana program apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki upaya untuk menjaga akuntabilitas program penanggulangan kemiskinan agar tetap berjalan sesuai tujuan kebijakan.

3.6. Keberlanjutan Usaha

Pemerintah Kota Mataram berupaya menjaga keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan melalui integrasi program lintas sektor dan evaluasi berkala. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk menciptakan dampak jangka panjang bagi masyarakat miskin. Selain itu, pemerintah juga berusaha mempertahankan kesinambungan program bantuan sosial agar masyarakat tetap memperoleh perlindungan sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan program masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran dan perubahan kondisi ekonomi masyarakat. Namun demikian, pemerintah daerah terus melakukan penyesuaian program dan penguatan koordinasi antar lembaga agar program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan secara berkelanjutan. Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk mempertahankan konsistensi kebijakan penanggulangan kemiskinan.

3.7. Pembelajaran dan Adaptasi

Pemerintah Kota Mataram melakukan pembelajaran dan adaptasi melalui evaluasi program penanggulangan kemiskinan secara berkala. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas program serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan. Pemerintah daerah juga melakukan penyesuaian program berdasarkan kondisi masyarakat dan perkembangan persoalan kemiskinan di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pembelajaran dan adaptasi dilakukan melalui pembaruan data kemiskinan, peningkatan koordinasi antar OPD, serta penyempurnaan mekanisme penyaluran bantuan sosial. Pemerintah daerah menyadari bahwa persoalan kemiskinan bersifat dinamis sehingga kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu disesuaikan secara terus menerus. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya meningkatkan efektivitas program melalui proses evaluasi dan pembelajaran berkelanjutan.

3.8. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa *Political will* Pemerintah Kota Mataram dalam penanggulangan kemiskinan telah berjalan cukup baik melalui berbagai program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi lintas sektor. Temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa *political will* pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam keberhasilan kebijakan sosial.

Sama halnya dengan penelitian Azizah dkk (2020), penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah daerah sangat mempengaruhi efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Selain itu, temuan penelitian ini mengonfirmasi temuan utama dari Nurmala et al. (2024) dan Albaar & Athahirah (2025) bahwa intervensi kesejahteraan sosial yang efektif memerlukan komitmen politik lokal yang kuat. Studi ini juga berhasil memperdalam analisis

Mendrofa & Sonuari (2025) dengan menunjukkan cara mengatasi hambatan implementasi di lapangan melalui koordinasi lintas sektor yang solid. Lebih jauh lagi, hasil riset ini memberikan nuansa baru yang berbeda (mengonfrontasi) hasil studi Haliah dkk. (2025) jika dalam aspek keuangan institusional *political will* dinilai kurang signifikan, dalam ranah kebijakan penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah, kemauan politik justru terbukti menjadi motor penggerak utama keberhasilan program. Penelitian ini juga sejalan dengan pendapat Brinkerhoff yang menyatakan bahwa *political will* tercermin melalui tindakan nyata, keberlanjutan kebijakan, dan pengalokasian sumber daya. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa keterbatasan anggaran dan ketidaktepatan data penerima bantuan masih menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Mataram.

IV. KESIMPULAN

Pemerintah Kota Mataram telah menunjukkan *political will* yang relatif kuat dalam upaya penanggulangan kemiskinan, yang direalisasikan secara konkret melalui integrasi program bantuan sosial, akselerasi pemberdayaan masyarakat, penguatan koordinasi lintas sektor, serta alokasi sumber daya anggaran maupun aparatur secara strategis dan berkesinambungan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada waktu penelitian dan keterbatasan akses data lapangan sehingga penelitian belum mampu menggambarkan seluruh dinamika penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada wilayah lain dengan pendekatan yang lebih luas serta menggunakan metode campuran agar diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Pemerintah Kota Mataram, Bappeda Kota Mataram, Dinas Sosial Kota Mataram, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, serta seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Albaar, Y., & Astika Ummy Athahirah. (2025). Political will pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. *Repository IPDN*, *2*, 306–312. http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/20818

Ansar, M. C., Rusli, A. M., & Irwan, A. L. (2026). The intellectual structure of local capacity and poverty alleviation: A bibliometric analysis and future directions. *World Development Sustainability*, *8*, 100302. https://doi.org/10.1016/j.wds.2026.100302

Azizah, W. I., Mahmudah, Z., & Kriswibowo, A. (2020). Political will pemerintah Kabupaten Jombang terhadap penanggulangan kemiskinan di masyarakat desa. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Politik*, *1*(April), 50–62. http://www.jsep.sasanti.or.id/index.php/jsep/article/view/6%0A

Badan Pusat Statistik. (2025). *Jumlah dan persentase penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota*

di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2025. https://ntb.bps.go.id/id/statistics-table/3/UkVkWGJVZFNWakl6VWxKVFQwWjVWeTlSZDNabVFUMDkjMw==/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-nusa-tenggara-barat--2024.html

Brinkerhoff, D. W. (2010). Assessing political will for anti-corruption efforts: An analytic framework. *Public Administration and Development*, *20*(3), 239–252. https://doi.org/10.1002/1099-162X(200008)20:3<239::AID-PAD138>3.0.CO;2-3

Haliah, Hasan, H., Syamsuddin, Fatmawati, Ratna Sari Dewi, A., Alief Fahdal Imran Oemar, M., & Arisanty Razak, L. (2025). The effect of political will, information technology, and the quality of financial reporting information on fraud prevention. *Public and Municipal Finance*, *14*(1), 13–22. https://doi.org/10.21511/pmf.14(1).2025.02

Jeddawi, M., Rossad, A., Rahman, A., & Faisal, M. (2025). Dialektika kemiskinan dengan desentralisasi fiskal peran tradisi lokal di Provinsi Papua Barat Daya. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, *51*(2), 121–135. https://ejournal.ipdn.ac.id/JIPWP/article/view/6054/2412

Mendrofa, H., & Sonuari, M. I. (2025). Political will pemerintah Kota Bekasi dalam mewujudkan kesejahteraan sosial : studi kebijakan dan implementasi. *KONSEPSI (Knowledge on Sustainable Economics, Public Policy, & Social Innovations)*, *1*(1), 46–52. https://ojs.konsuli.com/konsepsi/article/view/17

Nemakonde, L. D. (2026). Political will and institutional reform as enablers of coherent disaster and climate risk governance in SADC and beyond. *South African Geographical Journal*, *108*(1). https://doi.org/10.1080/03736245.2025.2601093

Nurmala Hanny; Adiarsa, Sopyan Resmana, E. P. (2024). Political will pemerintah Kabupaten Karawang dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *10*(21), 219–224. https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/8612/7085

Rahmah, M., Nooraini, A., & Hamdi, M. (2022). Exploring the development of poverty eradication efforts in Southeast Asia: a scientometric perspective. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *1105*(1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/1105/1/012035

Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press. https://books.google.co.id/books?id=NQs75PEa618C

Shen, S. V. (2025). Political will as a source of policy innovation. *Policy Studies Journal*, *53*(1), 185–200. https://doi.org/10.1111/psj.12571

Sutiyo, & Maharjan, K. L. (2011). Rural poverty alleviation in Indonesia : programs and the implementation gap. *Journal of International Development and Cooperation*, *18*(1), 13–22. http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/00032448

T. Askali, S. (2025). Analysis of community constituents' view on political will in governance in the Philippines. *Environment and Social Psychology*, *10*(5).

https://doi.org/10.59429/esp.v10i5.3453

Zulaika, S., Fauzi, F. Z., & Suryapuspita, M. (2024). Poverty alleviation in special autonomy systems: dynamics and challenges of asymmetric decentralization. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, *7*(1), 31–42. https://doi.org/10.33701/jkp.v7i1.4286

